

ABSTRAK

Resolusi Parlemen Eropa No. 2016/2222 (INI) mengenai Minyak Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan merupakan produk hukum non-legislatif dan bukan merupakan bagian dari proses legislatif Uni Eropa manapun. Resolusi ini dibuat untuk menghimbau serta menuntut Uni Eropa untuk melakukan upaya nyata dalam mengurangi deforestasi, terutama yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit. Walaupun hanya dilihat sebagai rekomendasi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa rekomendasi yang tertuang dalam Resolusi ini dimasukkan sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan oleh Uni Eropa di masa mendatang.

Adapun permasalahan hukum yang dapat diambil adalah apakah Resolusi Minyak Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa bertentangan dengan ketentuan perdagangan WTO dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengatasi kemungkinan larangan perdagangan minyak sawit yang akan terjadi di masa mendatang.

Karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana bahan-bahan hukum yang ada, didapat menggunakan metode studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian pada karya tulis ini adalah perspektif , dengan bahan hukum yang dianalisis menggunakan penafsiran sistematis, komparatif, dan teleologis.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Resolusi Parlemen Eropa No. 2016/2222 (INI) berimplikasi negatif terhadap prinsip *Most Favoured Nation*, *National Treatment*, serta *Quantitative Restriction*. Adapun terhadap prinsip pengecualian, resolusi ini berimplikasi negatif terhadap Article XX (b) GATT dan *Chapeau* Artikel XX tetapi dapat dijustifikasi oleh Article XX (g) GATT. Terhadap ketentuan yang tertuang di dalam *TBT Agreement*, resolusi ini bukan merupakan peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian. Dalam menindaklanjuti keluarnya resolusi ini, pemerintah Indonesia sudah mengirimkan surat dan respon keberatan terhadap isi resolusi tersebut. Indonesia, melalui kementerian-kementerian terkait sudah melakukan koordinasi dan memikirkan solusi dan tindak lanjut yang akan dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman hambatan perdagangan minyak sawit.

Kata Kunci : Minyak Sawit, Deforestasi, Resolusi Parlemen Eropa, GATT/WTO

ABSTRACT

European Parliament resolution on palm oil and deforestation of rainforest (2016/2222 (INI)) is a non-legislative legal product and was not part of any European Union legislative process. This resolution is made to appeal and call on the European Union to make concrete efforts to reduce deforestation, especially the deforestation associated with palm plantations. Although this resolution is only seen as a recommendation, it does not rule out the possibility that the recommendations contained in this resolution are included as consideration for policies that will be issued by the European Union in the future.

The legal issues that could be taken are whether European Parliament resolution on palm oil and deforestation of rainforest against the WTO rules and how Indonesia deals with the possibility of a palm oil trade ban that will occur in the future.

This research is conducted by using juridical-normative approach, where the legal materials that available are obtained using the library research method. The specification of this research in perspective, with the materials, analyzed using systematic, comparative, and teleological interpretations.

The results of this study indicate that European Parliament Resolution No. 2016/2222 (INI) have issues against the Most-Favoured-Nation Principle, National Treatment Principle, and Quantitative Restriction. As for the exceptions principle, this resolution has issues against Article XX (b) GATT and Chapeau of Article XX but can be legitimated by Article XX (g) GATT. Regarding the rules on the TBT Agreement, this resolution cannot be addressed as a technical regulation, standard, or conformity assessment procedure. Following up on these issues, the Indonesia government has sent a letter to the European Union and gave a response regarding the contents of the resolution. Indonesia, through the relevant ministries, has coordinated and has planned solutions and follow-up actions that will be carried out by Indonesia in facing the threat of palm oil trade barriers.

Keywords : Palm oil, Deforestation, European Parliament Resolution, GATT/WTO